

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi system akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi, diskusi serta asistensi dengan narasumber dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Semoga LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dapat dijadikan salah satu referensi parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi.

Kolonodale, Februari 2023
Kepala Bagian Hukum,



BETS A. POMBALAWO, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19780121 200604 2 027

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Government*) di Indonesia.

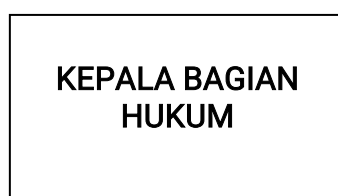
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Tahun 2022 diharapkan dapat :

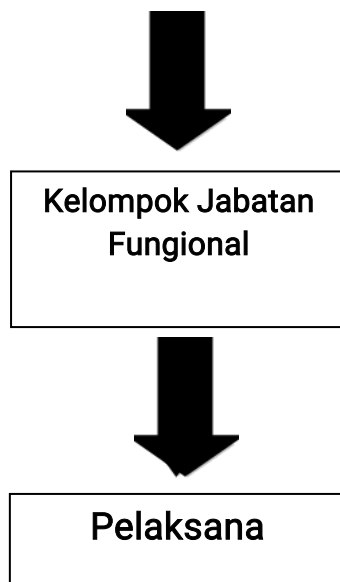
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.
2. Mendorong Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara di dalam pelaksanaan Visi dan Misi sesuai program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian, 3 (tiga) Jabatan Fungsional dan Pelaksana, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM





1.2. KEADAAN PEGAWAI

Pegawai merupakan aset penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. kinerja dan profesionalitas yang baik dari pegawai, menjadi aset penentu bagi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena pegawai adalah sumber daya penggerak dari sebuah organisasi. Jumlah Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 orang, dengan pembagian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

- ▶ S1 : 10 Orang
- ▶ SMA : 3 Orang

2) Menurut Jabatan

- ▶ Eselon III : 1 Jabatan
- ▶ Jabatan Fungsional : 3 Jabatan
- ▶ Jabatan Pelaksana: 9 Jabatan

3) Menurut Golongan

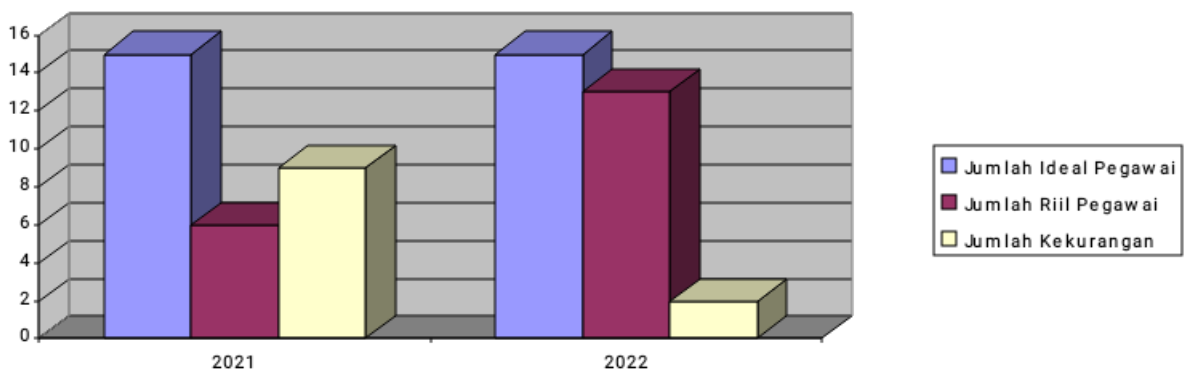
- ▶ Golongan IV/a : 1 orang
- ▶ Golongan III/d : 2 orang
- ▶ Golongan III/c : 1 orang
- ▶ Golongan III/b : 1 orang
- ▶ Golongan III/a : 5 orang
- ▶ Golongan II/a : 1 orang
- ▶ Golongan II/b : 2 orang

4) Menurut Jenis Kelamin

- ▶ Laki - Laki : 4 orang
- ▶ Perempuan : 9 orang

Berdasarkan beban kerja dan jumlah program kegiatan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara mengalami penambahan pegawai pada tahun 2022. Jumlah pegawai yang ada telah hampir sebanding dengan beban kerja yang dimiliki, idealnya jumlah pegawai yang ada di Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 15 (lima belas) orang, Sedangkan kondisi saat ini jumlah keseluruhan pegawai di Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang.

DIAGRAM 1
JUMLAH PEGAWAI



1.3. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Gedung yang ditempati Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara adalah Gedung Kantor Bupati Morowali Utara, sehingga relatif nyaman digunakan sebagai tempat kerja, sarana kendaraan dinas masih dirasakan cukup dengan kondisi sekarang. Bagian Hukum juga mempunyai fungsi yang bersifat operasional dan pelayanan, sehingga akses mobilitas ketugasan dinas harus perlu dijaga.

Sarana laptop secara kualitas ada beberapa peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga setiap pegawai telah mendapatkan fasilitas berupa laptop demi untuk kelancaran tugas-tugas di masing-masing jabatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara. sedangkan jaringan internet dan *local area network* perlu ditata kembali, karena jaringan elektronik ini dibutuhkan untuk memperlancar tugas-tugas dinas pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi aset tetap posisi tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi jenis bidang barang, sebagai berikut :

TABEL 1.1
REKAPITULASI ASET TETAP

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
		Tahun 2021		
		Meja kerja (local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	2	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Vario 125cc)	1	18.700.000,-
		Tahun 2022		
		Meja kerja (local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	2	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda	1	18.700.000,-

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
		Vario 125cc)		
		Laptop Asus Core I5	2	21.597.600,-

1.4. KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menerima alokasi anggaran sebelum Perubahan sebesar **Rp.832.123.250,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar **Rp.19.800.000,-**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.797.113.250,-**, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.15.210.000,-**, setelah perubahan Anggaran Tahun 2022 alokasi dana Bagian Hukum bertambah sebesar **(Rp.149.999.250,-)** yang terdiri dari Belanja Pegawai tidak mengalami penambahan atau pengurangan, Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar **(Rp.143.611.650,-)** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar **(Rp.6.387.600,-)** ditampilkan ke dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1.2
BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL T.A 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	19.800.000,-	19.800.000,-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	797.113.250,-	(940.724.900,-)	(143.611.650,-)
3	Belanja Modal	15.210.000,-	21.597.600	6.387.600,-
	Jumlah	(832.123.250,-)	(982.122.500,-)	(149.999.250,-)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGI

A. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Visi dan Misi Bagian Hukum

Dalam menghadapi perubahan dan adanya tantangan paradigma kegiatan pemerintahan yang mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut.

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik tingkat lokal, regional maupun global, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan sebuah visi strategis.

Visi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

"Penegakkan Supremasi Hukum Serta Terwujudnya Pelayanan Prima"

Terjemahan visi di atas adalah, bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kedudukannya sebagai unit organisasi berupaya mendayagunakan aparatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa serta berbudaya pemerintahan, dicerminkan melalui perilaku birokrasi yang efisien, efektif serta dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta otonomi daerah.

Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan beberapa misi sebagai berikut :

Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Menjadikan pelayanan administratif yang prima dalam memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta telaahan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas serta peningkatan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian HAM.
6. Melakukan inventarisasi, evaluasi, pengkajian, klarifikasi dan monitoring terhadap produk hukum daerah.

C. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, maka disusun matrik keselarasan kinerja

untuk menjamin bahwa keterkaitan pencapaian kerja Bagian Hukum dengan kinerja kepala daerah.

- **Keselarasan misi ke 5**

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	Tujuan	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	
	sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum	

D. Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sebanyak 1 sasaran strategis.

Rumusan tujuan dan sasaran didasrkan pada rumusan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah morowali utara untuk 5 (lima) Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran 2021-2026

Tujuan	sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum

E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum

Bagian Hukum menentukan Indikator Kinerja utama sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

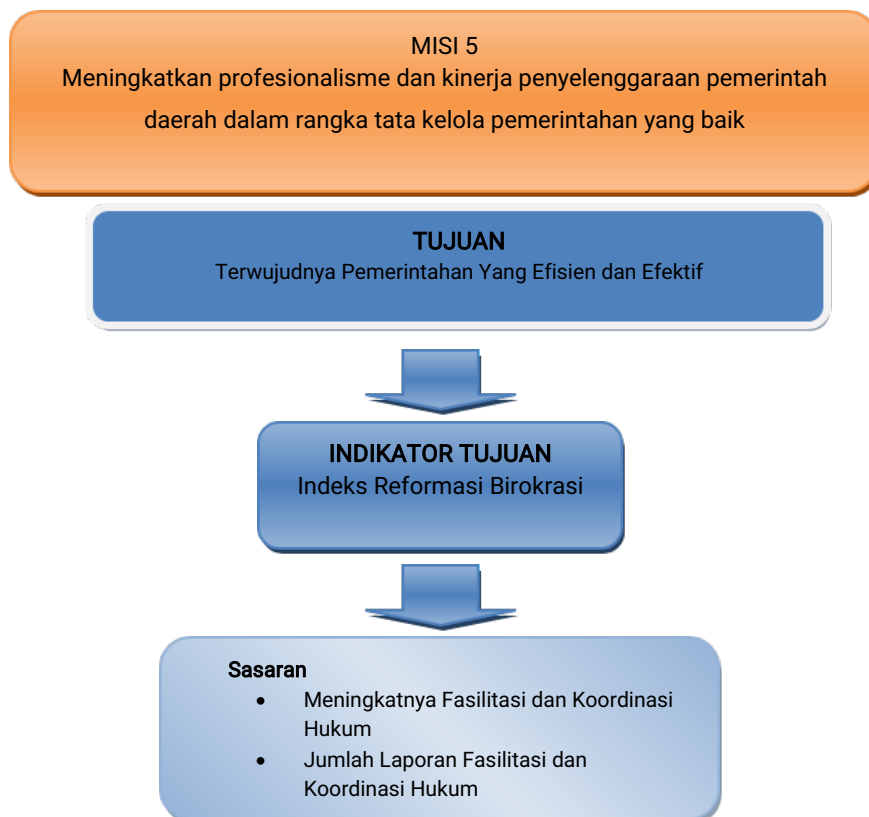
TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN HUKUM

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formasi IKU	Sumber DATA	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun Ke					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.			Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Indeks Refoermasi Birokrasi	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum per tahun /Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang ditargetkan X 100	Bagian Hukum	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan

2.2. *Cascading* Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara maka disusun lah *cascading* kinerja Bagian Hukum. *Cascading* tersebut tersusun dalam matrik keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya *cascading* kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasana kinerja yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah adalah misi ke-5 dengan matriks sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :



2.3. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan

anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2022 :

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dan layanan administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Bagian Hukum	94,74 %
3.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi hukum	18 Laporan

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 561.246.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 106.140.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 278.000.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 21.597.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 133.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 21.707.150
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 420.876.500
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 179.430.200
2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 200.906.700
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 40.539.600

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut **Rp.982.122.500,-** (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	18 Laporan	18 Laporan	94,74%	Jumlah Laporan yang Tersusun /Total Laporan x 94,74%
Capaian Rata-Rata					94,74%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Hukum dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 3.2

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Secara umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Hukum adalah 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama pada tahun 2022, Pencapaian kerjanya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.3

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Jumlah indikator kinerja sasaran	Keterangan
1.	$91 \leq 100$	1	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	-	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	-	Sedang
4.	$51 \leq 65$	-	Rendah
5.	≤ 50	-	Sangat Rendah
Jumlah		1	

Gambaran pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran “**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**”, dapat dilihat dari indikator yaitu; Jumlah produk hukum yang difasilitasi per tahun. Pada Tahun 2022, dengan pencapaian kinerja rata-rata 94,74% dengan predikat Sangat Baik.

3.2 PEBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021-2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	0	18

Pada Tahun 2021 realisasi indikator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan serta dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 indikator kinerja utama bagian hukum terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja utama bupati yang berakibat terjadinya perubahan pada IKU seluruh perangkat daerah. Adapun realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebanyak 18 Laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 18 laporan pula.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

Realisasi capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Hukum Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	18	18	94,74 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Hukum tahun 2021-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 94,74%.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat daerah. Sumber daya pendukung di Bagian hukum Sekretariat

daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
3.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 982.122.500,-
4.	Belanja Langsung	Rp. -
5.	Alokasi Total Belanja	Rp. 982.122.500,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 982.122.500,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 876.004.989,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 876.004.989,-

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 876.004.989,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 876.004.989,-

a. $\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp. 876.004.989,-}}{\text{Rp. 982.122.500,-}} \times 100\%$$

$$= 89,20\%$$

b. $\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp. -}}{\text{Rp. -}} \times 100\%$$

$$= -$$

c. $\text{Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

$$\text{Alokasi Total Belanja}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 876.004.989,- \times 100\% \\ &= \text{Rp. } 982.122.500 \\ &= \mathbf{89,20\%} \end{aligned}$$

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 (dua) orang tenaga honorer. Dari Jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Bagian Hukum Tahun 2022 yakni 94,74%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi dan pada sasaran ini, dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari produk hukum yang difasilitasi per tahun dan pada Tahun 2022 ini Bagian Hukum mengalami Penurunan pada fasilitasi penyusunan produk hukum pada Bagian Hukum.

Penurunan Capaian yang dialami oleh Bagian Hukum disebabkan oleh adanya beberapa instansi yang mengajukan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di tahun 2022 tetapi tidak di tindaklanjuti dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Bupati sesuai target waktu yang ditentukan pada tahun 2022.

Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah yaitu sejumlah 20 (dua puluh) rancangan peraturan daerah, tetapi yang telah terealisasi yaitu sejumlah 9 peraturan daerah, selanjutnya Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah yaitu sejumlah 34 (tiga puluh empat) dan telah terealisasi seluruhnya menjadi peraturan bupati.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk tetap konsisten dalam menjalankan kegiatan agar dapat mencapai target yang diinginkan yaitu mendorong

semua perangkat daerah yang telah mengajukan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di tahun berjalan agar merealisasikan setiap rancangan yang telah direncanakan, diajukan dan ditindaklanjuti dengan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hingga sampai ke tahap pengundangan menjadi produk hukum daerah.

4. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

RENSTRA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Hukum dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Ikhtisar realisasi

anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.7
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	561.246.000	476.836.673	84,96%
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	420.876.500	399.168.316	94,84%
Total				982.122.500	876.004.989	89,20 %

3.4 EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas, dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 1. Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF
3. Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.8
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	SERAPAN	EFISIENSI
-----	-------------------	---------	---------	-----------

		KINERJA	ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	94,74%	89,20	Belum Efisiensi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **BELUM EFEKTIF**.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masing-masing Perangkat Daerah akan arti penting pembentukan Produk Hukum Daerah.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran Perangkat Daerah yang terkait terhadap arti pentingnya Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang telah diajukan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah Tinggi, karena dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tersebut dikategorikan dengan Predikat Tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BETSI A. POMBALWO, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19780121 200604 2 027